



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

BPKAD kaltim
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



RENCANA KERJA

TAHUN 2025



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



bpkadkaltim_



bpkadkaltim



BPKAD Prov.Kaltim



bpkad.kaltimprov.go.id

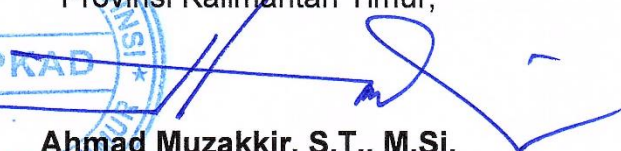
KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan anugerah-NYA sehingga dapat tersusun Rencana Kerja Tahun 2025 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, disamping itu untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dengan harapan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan Perangkat Daerah (PD).

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Juli 2024

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Timur,

Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19751001 200112 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun	
Lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	35
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD.....	37
2.5 Penelahaan usulan program dan kegiatan masyarakat..	41
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	42
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional.....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
3.3.Program dan Kegiatan.....	46
3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Beserta Anggaran..	47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	48
4.1 Program BPKAD Provinsi Kaltim Tahun 2025.....	48
BAB V P E N U T U P.....	84
5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.....	84
5.2 Rencana Tindak Lanjut.....	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja BPKAD Prov.Kaltim dan pencapaian Renstra PD s/d tahun 2023	7
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Provinsi Kaltim..	35
Tabel 2.4 Review terhadap Renja RKPD tahun 2025.....	38
Tabel 2.5 Usulan Program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2025.....	41
Tabel 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	44
Tabel 4.1 Program kegiatan BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2025.....	49
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2025.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, perubahan struktur BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Pergub Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah (PD) .

Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renja Perangkat Daerah (PD), oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) dapat dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah (PD) dengan mengacu pada evaluasi rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) .

Renja Perangkat Daerah (PD) memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Rancangan Akhrit Renja Perangkat Daerah (PD) pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pada pelaksanaan penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) dalam tahun berjalan juga dilakukan Pengukuran Kinerja (PK) untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah (PD) serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Renja Perangkat

Daerah (PD) disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (PD) perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra Perangkat Daerah (PD) dan RKPD tahun bersangkutan. Renja Perangkat Daerah (PD) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Renja Perangkat Daerah (PD) menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah yang tertuang dalam RKPD dan Renstra Perangkat Daerah (PD) dalam rencana program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi, Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan. Oleh sebab itu penyusunan Renja BPKAD Tahun Anggaran 2025 diharapkan lebih konkrit dan terukur.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah (PD) harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program, kegiatan, sub kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
3. Penyusunan Renja ini sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan basis data KUA PPAS tahun 2025 yang memuat arah kebijakan Pemerintah selama satu tahun.

1.2 Landasan Hukum

Bahwa Penyusunan Renja Perangkat Daerah (PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengacu :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
3. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2005 – 2025.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

- a. Memberikan informasi tentang rencana program dan kegiatan tahunan;
- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran;
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan;
- e. Menyelaraskan program dengan penganggaran;

Tujuan antara lain :

1. Menjabarkan Renstra ke dalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur;
3. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada BPKAD Provinsi Kaltim;

1.4 Sistematika Penulisan

Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab 1 : Pendahuluan
Bab ini memuat :
1. 1 Latar Belakang
 1. 2 Landasan Hukum
 1. 3 Maksud Tujuan dan
 1. 4 Sistematika Penulisan
- Bab 2 : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu
Bab ini membuat :
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
 - 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
 - 2.4 Review Terhadap RKPD
 - 2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- Bab 3 : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab ini memuat :
- 3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- Bab 4 : Rencana Kerja dan Pendanaan
Bab ini memuat : Rencana kerja secara eksplisit yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kerja yang direncanakan dalam Renstra PD
- Bab 5 : Penutup
- 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
 - 5.2 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH (PD) TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (PD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasikan pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah (PD) yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Renja Perangkat Daerah (PD) tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Rankhir Renja Perangkat Daerah (PD) dan prakiraan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (PD) (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur keluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*). Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja, metode ini diharapkan dapat menjadi acuan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, selain menjalankan tugas dan fungsi selaku SKPD juga selaku SKPKD yang melakukan fungsi pengelolaan keuangan dan aset-aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa BPKAD sebagai unsur penunjang urusan keuangan dan aset dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara tidak langsung juga mendukung capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan representasi agenda utama pembangunan yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah terdapat 8 (delapan) Prioritas Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diverifikasi vertikal dan horizontal pada sector unggulan;
4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan; tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerjasama;

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 dapat dilihat dari (tabel 2.1)

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023.

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program (Renstra PD) Thn. 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah S.D Tahun Berjalan	
					Target Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S.D Tahun Berjalan	Realisasi Tingkat Capaian Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8= (7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Keuangan (Indikator Tahun 2023)	-	81,03	90	83,98	93,31	90	255,01	283,34
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	82 (Indeks)	-	-	-	-	-	82	100%

		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100%		-		-		-		-	-		100%		100%
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.01 .001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	100%
5.02.001.1.01 .002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01 .003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%

5.02.001.1.01 .004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01 .005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.01 .006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	100%
5.02.001.1.01 .007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	7	Laporan	100%	7	Laporan	21	Laporan	100%
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%

5.02.001.1.02 .001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124	Orang/Bulan	124	Orang/Bulan	124	Orang/Bulan	124	Orang/Bulan	100%	124	Orang/Bulan	372	Orang/Bulan	100%
5.02.001.1.02 .002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	100%	400	Dokumen	1.200	Dokumen	100%
5.02.001.1.02 .003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	400	Dokumen	100%	400	Dokumen	1.200	Dokumen	100%
5.02.001.1.02 .004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.001.1.02 .005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%

5.02.001.1.02 .006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100%	3	Dokumen	9	Dokumen	100%
5.02.001.1.02 .007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100%	3	Laporan	9	Laporan	100%
5.02.001.1.02 .008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.03 .006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%

5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	1	Paket	3	Paket	100%
5.02.001.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140	Orang	140	Orang	140	Orang	140	Orang	100%	140	Orang	420	Orang	100%
5.02.001.1.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140	Orang	140	Orang	140	Orang	140	Orang	100%	140	Orang	420	Orang	100%

5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%
5.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100%	12	Paket	36	Paket	100%

5.02.001.1.06 .008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	6	Laporan	100%	6	Laporan	18	Laporan	100%
5.02.001.1.06 .009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.06 .010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	100%
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tesedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	233,33%		233%
5.02.001.1.07 .002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	3	Unit	100%

5.02.001.1.07 .006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	Unit	20	Unit	20	Unit	20	Unit	100%	20	Unit	60	Unit	100%
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.08 .001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.08 .002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.08 .003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%

5.02.001.1.08 .004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	100%
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.001.1.09 .001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	Unit	6	Unit	6	Unit	6	Unit	100%	6	Unit	18	Unit	100%
5.02.001.1.09 .002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	25	Unit	25	Unit	25	Unit	100%	25	Unit	75	Unit	100%
5.02.001.1.09 .006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	12	Unit	12	Unit	12	Unit	100%	12	Unit	36	Unit	100%

5.02.001.1.09 .009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100%	5	Unit	15	Unit	100%
5.02.002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%		300%	300%
5.02.002.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%		233,33%	233%
5.02.002.1.01 .001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Koordinasi Penyusunan KUA PPAS	2	Dokumen	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002.1.01 .002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS	2	Dokumen	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%

5.02.002.1.01 .003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi RKA SKPD	37	Dokumen	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002.1.01 .004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD)	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	-	-	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
		Jumlah Perubahan RKA- SKPD Diverifikasi	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	100%	37	Dokumen	111	Dokumen	
5.02.002.1.01 .005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	-	-	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	37	Dokumen	100%	37	Dokumen	111	Dokumen	

5.02.002.1.01.006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	37	Dokumen	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002.1.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang APBD dan Perda tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002.1.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perda tentang Perubahan APBD dan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	-	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	Dokumen	0		0		0		0%	0		0		
5.02.002.1.01.009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3	Dokumen	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%

5.02.002.1.01.011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1	Dokumen	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002.1.01.013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah dan Pemerintah Provinsi	74	Orang	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.02.002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	20	Laporan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%
5.02.002.1.02.003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab/Kota dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	-	-	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%

	Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20	Laporan	0		0		0		0,00	0		0		
5.02.002.1.02.004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	30	Laporan	300%
5.02.002.1.02.006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	3	Laporan	12	Laporan	12	B,	12	B,	100%	12	Laporan	36	Laporan	300%
5.02.002.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%		100%	100		1.929.905.457
5.02.002.1.03.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	300%

5.02.002.1.03.002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	300%
5.02.002.1.03.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460	Dokumen	460	Dokumen	460	Dokumen	460	Dokumen	100%	460	Dokumen	1.380	Dokumen	300%
5.02.002.1.03.004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	300%
5.02.002.1.03.005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16	Dokumen	16	Dokumen	16	Dokumen	16	Dokumen	100%	16	Dokumen	48	Dokumen	300%
5.02.002.1.03.006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100%	2	Dokumen	6	Dokumen	300%

5.02.002.1.03.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	300%
5.02.002.1.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100%	12	Dokumen	36	Dokumen	300%
5.02.002.1.03.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12.000	Dokumen	12.000	Dokumen	25.000	Dokumen	35.609	Dokumen	142%	12.000	Dokumen	59.609	Dokumen	497%
5.02.002.1.03.010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	300%

5.02.002.1.03 .011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10	Orang	10	Orang	10	Orang	10	Orang	100%	10	Orang	30	Orang	300%
5.02.002.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.04 .001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100%	4	Laporan	12	Laporan	300%
5.02.002.1.04 .002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	84	Dokumen	84	Dokumen	84	Dokumen	84	Dokumen	100%	84	Dokumen	252	Dokumen	300%
5.02.002.1.04 .003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100%	12	Laporan	36	Laporan	300%

5.02.002.1.04 .004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD , BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD , BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	48	Laporan	100%	48	Laporan	144	Laporan	300%
5.02.002.1.04 .005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106	Dokumen	106	Dokumen	106	Dokumen	106	Dokumen	100%	106	Dokumen	318	Dokumen	300%
5.02.002.1.04 .006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100%	6	Dokumen	18	Dokumen	300%
5.02.002.1.04 .008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576	Dokumen	576	Dokumen	576	Dokumen	576	Dokumen	100%	576	Dokumen	1.728	Dokumen	300%
5.02.002.1.04 .009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	300%

5.02.002.1.04 .010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	300%
5.02.002.1.04 .011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480	orang	480	orang	480	orang	480	orang	100%	480	orang	1.440	orang	300%
5.02.002.1.04 .012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6	Lembaga	6	Lembaga	6	Lembaga	6	Lembaga	100%	6	Lembaga	18	Lembaga	300%
5.02.002.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.05 .002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	300%

5.02.002.1.05 .008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	10	Laporan	100%	10	Laporan	30	Laporan	300%
5.02.002.1.05 .009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21	Laporan	21	Laporan	21	Laporan	21	Laporan	100%	21	Laporan	63	Laporan	300%
5.02.002.1.05 .010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	16	Laporan	100%	16	Laporan	48	Laporan	300%
5.02.002.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.002.1.06 .002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3	Dokumen	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	12	Bulan	36	Bulan	300%

5.02.003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Aset Tetap (Tanah & Bangunan) Daerah yang Diamankan	40%		90%		80%		100%		126%	40%		231,67%		193%
5.02.003.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%		100%		100%		100%		100%	100%		233,33%		233%
5.02.003.1.01 .001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	300%
5.02.003.1.01 .002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	3	Dokumen	100%
5.02.003.1.01 .003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	200%

5.02.003.1.01 .004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen	0	0	1	Dokumen	1	Dokumen	100%	1	Dokumen	2	Dokumen	200%
5.02.003.1.01 .005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	0	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	2	Laporan	200%
5.02.003.1.01 .006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1	Laporan	0	0	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	2	Laporan	200%
5.02.003.1.01 .007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100%	2	Laporan	6	Laporan	100%
5.02.003.1.01 .008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3	Laporan	0	0	15	Laporan	15	Laporan	100%	3	Laporan	18	Laporan	600%

5.02.003.1.01 .009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	laporan	0	0	1	Laporan	1	laporan	100%	1	laporan	2	laporan	200%
5.02.003.1.01 .010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	20	Dokumen	100%	20	Dokumen	60	Dokumen	300%
5.02.003.1.01 .011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100%	8	Laporan	24	Laporan	100%
5.02.003.1.01 .012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100%	1	Laporan	3	Laporan	100%
5.02.003.1.01 .013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50	Orang	50	Orang	50	Orang	50	Orang	100%	50	Orang	150	Orang	100%

**Realisasi Persentase keuangan tahun 2023 sebesar (sampai tanggal 29 Desember/Triwulan IV 2023) 92,40% Rp. 6.538.311.718.546.00,-
Dari Pagu Anggaran Rp. 7.075.874.485.939,00,-**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal Perangkat Daerah (PD) dapat digunakan beberapa metode antara lain :

1. SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity, Threats) ,CSF (Critical Success Factor).
2. RAD (Rapid Application Development)
3. EUD (End User Development)
4. PEST (Political, Economic, Social and Technological)

Dari beberapa metode tersebut dipilih analisis SWOT karena dipandang paling sesuai untuk diaplikasikan. Analisis kondisi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT:

2.2.1 Strength (kekuatan) Internal

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Kalimantan Timur dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/ Perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota serta Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD/ Perubahan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota;
2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Sebagai mediator antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/ kota terkait dengan distribusi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
4. Memiliki sarana prasarana dan sistem informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.2 Weaknesses (kelemahan), internal

1. Adanya lembaga/ instansi yang masih memiliki sikap egosektoral dalam menjalankan suatu program dan kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor lain yang ada;
2. Masih adanya sebagian ASN yang kurang memiliki kepekaan dalam memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsi BPKAD serta masih rendahnya disiplin kerja;

3. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang cukup tinggi;
4. Belum tersedianya jadwal reguler pelatihan maupun sertifikasi pengembangan kompetensi yang disediakan oleh *stake holders*, terutama dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.2.3 Opportunities (Peluang) external

1. Berdasarkan pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa BPKAD selaku SKPKD mempunyai tugas, antara lain menyusun rancangan APBD/ rancangan perubahan APBD, mengesahkan DPA-SKPD, Surat Perintah Pembayaran, dan melakukan pembayaran permintaan Pengguna Anggaran (PA) atas beban rekening kas umum daerah, untuk itu BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi Perangkat Daerah (PD) melakukan perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
3. Sesuai pasal 3 ayat (5) angka 19 huruf a Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi mengatur realokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kab/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat;
4. Adanya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengamanatkan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat merumuskan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta lebih berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan Kepada Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.2.4 Threats (ancaman) external

1. Banyaknya PNS yang Purna Tugas memasuki Purna Tugas dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) sehingga diperlukan adanya tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya.
2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi peraturan perundang-undangan yang pada nya berakibat kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang.
3. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang berdampak cukup signifikan dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah terutama kesiapan *Stake Holder* dan Regulasi di Daerah.

Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel.2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator Kinerja	SPM	IKK	Target Renstra PD			Catatan Analisis
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Tepat Waktu			100%	100%	100%	-
2.	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPD Sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada Tahun ini (t-0)			40%	60%	47%	-
3.	1. Indeks Kualitas layanan Kesekretariatan			82	86	86	-
	2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti			100 %	100 %	100 %	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKAD selaku SKPD maupun SKPKD.

Sesuai pasal 5 ayat (3) huruf a dan pasal 7, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, didalam menjalankan tugas dan fungsi terdapat isu-isu strategis dalam pelaksanaannya antara lain :

- 1. Bantuan Keuangan Spesifik dan Non Spesifik (Fokus Forum Renja)
- 2. Pergeseran Anggaran (Fokus Forum Renja)
- 3. Implementasi Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan penggunaan KKPD (Fokus Forum Renja)
- 4. Penyelesaian P3D (Fokus Forum Renja)
- 5. Penyusunan RKA/DPA-SKPD yang masih kurang optimal sehingga berimbas pada konsistensi dan sinkronisasi APBD dengan dokumen Perencanaan Daerah.
- 6. Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terutama terkait Investasi Property.

7. Dalam melakukan pemanfaatan barang milik daerah dilakukan berdasarkan nilai wajar, sementara dalam pencatatan masih berdasarkan nilai perolehan/ kontrak (masih terdapat perbedaan)
8. Pada Sebagian besar aset tetap berupa tanah belum dilengkapinya bukti kepemilikan Barang Milik Daerah terutama terhadap aset tanah yang merupakan dampak P3D.
9. Untuk melakukan Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah diperlukan data yang akurat terkait Barang Milik Daerah dan Organisasi Khusus yang menanganinya (UPTD).
10. Tidak adanya kebijakan yang tegas mengatur pembagian tugas dan wewenang antara BMD Pengguna dengan BMD Pengelola.
11. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai.

Berdasarkan hal tersebut diperkirakan akan berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Program Prioritas pada Bantuan Keuangan spesifik harus ditetapkan melalui RKPD untuk menjadi Pedoman;
2. Bantuan Keuangan Spesifik diusulkan untuk dapat disalurkan 100%
3. Permohonan Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota diusulkan berdasarkan prioritas Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
4. Kegiatan/Sub Kegiatan yang realisasi belanja pada tahun sebelumnya dibawah 60-70% agar ditelaah kembali, untuk dilaksanakan pergeseran atau dianggarkan kembali untuk belanja yang lebih dibutuhkan.
5. Pergeseran Anggaran akan difasilitasi dengan menggunakan aplikasi khusus pergeseran sehingga akan memudahkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pergeseran.
6. KKPD digunakan untuk menunjang belanja daerah, sebagai bentuk percepatan realisasi Belanja yang menggunakan Uang Persediaan (UP) serta untuk meningkatkan UMKM dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)
7. Membentuk Tim P3D Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertugas untuk meneliti secara seksama, detail dan menyeluruh baik fisik barang maupun dokumennya.
8. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur guna menunjang pelaksanaan keseluruhan proses pengelolaan keuangan daerah;
9. Optimalisasi sistem informasi yang ada untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
10. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal;
11. Peningkatan fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana serta aset;

12. Integrasi sistem antar pengelolaan keuangan dengan pengelolaan aset (barang milik daerah) merupakan suatu yang menjadi sangat urgen dalam mendukung terciptanya optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset. Integrasi sistem ini juga sangat urgen dalam hal fungsi penatausahaan dengan aplikasi perbankan dalam pelaksanaan transaksi non tunai.
13. Penyusunan peta proses bisnis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti dengan penyempurnaan dan peningkatan implementasi.
14. Penyempurnaan Evaluasi, Mitigasi serta Penerapan Manajemen Risiko BPKAD Provinsi Kalimantan Timur agar dapat meningkatkan Level Maturitas Manajemen Risiko BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini masih pada Level I menjadi Level III, sehingga dapat selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BPKAD Provinsi Kalimantan Timur.

2.4 **Review terhadap RKPD**

Berdasarkan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel.2.4 Review terhadap RKPD BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Rancangan awal RKPD						Hasil analisis kebutuhan					
No	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (ribuan)	Program/ Keg	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (ribuan)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Perda dan pergub tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan tepat waktu	100 %	6.420.377.057.183,56,-	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Perda dan pergub tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditetapkan tepat waktu	100 %	6.577.888.888.086,-	
a.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		7.102.731.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daeerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		9.761.361.119,-	
b.	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota		998.040.000,-	Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota		1.240.104.000,-	
c.	Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah		5.613.984.000,-	Koordinasi dan Pengelolaan perbendahara an Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan perbendaharaan Daerah		5.798.372.908,-	
d.	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan pelaporan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan pelaporan keuangan daerah		5.447.664.000,-	Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan pelaporan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Koordinasi dan pelaksanaan akutansi dan pelaporan keuangan daerah		4.965.514.461,-	

e.	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		6.399.883.935.183,56,-	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah		6.555.570.060.000,-	
f.	Pengelolaan Data dan Implementasi Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah		1.330.723.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah		553.475.598,-	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	45 %	9.855.665.000,-	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	45 %	9.399.627.381,-	
a.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan BMD		9.855.665.000,-	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengelolaan BMD		9.399.627.381,-	-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 % 84 Indeks	81.389.476.816,44,-	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100 % 84 Indeks	425.805.499.683,-	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.688.352.000,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.096.510.020,-	
	Administrasi Keuangan	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		37.801.441.816,44,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		384.396.969.251,-	

	Perangkat Daerah										
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		831.702.000,-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		307.901.969,-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.746.572.000,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.907.022.974,-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		9.938.838.000,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah		10.869.330.325,-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		2.162.425.000,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		2.118.712.427,-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12.499.021.000,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		8.959.343.852,-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan BPKAD Prov.Kaltim		14.721.125.000,-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kaltim/ Luar Kaltim	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan BPKAD Prov.Kaltim		15.149.708.865,-	

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa dari hasil perbandingan antara program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan pagu indikatif RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah sesuai dan dapat mengakomodir program/kegiatan, lokasi, indikator, target dan kebutuhan anggaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dibidang keuangan

Dalam pelaksanaan tugasnya BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tidak bersentuhan langsung terhadap pelayanan masyarakat. Namun dalam melaksanakan fungsi tersebut, BPKAD Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut, usulan-usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang disampaikan melalui BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana pada tabel 2.5 berikut :

Tabel. 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Prov. Kaltim

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Persentase Perda dan Pergub Tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	-	-
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kaltim/Luar Kaltim	Persentase Keseluruhan Target Temuan BPK s/d LKPD Sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)		
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Kaltim/Luar Kaltim	1. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		
			2. Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut, perlu adanya desentralisasi keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program Nasional dan untuk mensinergikan pelayanan program pembangunan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 (RPD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, masing-masing pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan program pembangunan daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa

datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Renstra Tahun 2024-2026 antara lain,

- a. Memanfaatkan dana yang tersedia secara maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat/ ASN
- b. Memusatkan tujuan/arah perencanaan anggaran, program dan kegiatan prioritas sesuai dinamika dan kebutuhan yang berkembang;
- c. Meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) , pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
- d. Meningkatkan komunikasi dan integrasi data dalam pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Inventarisasi jumlah dan jenis pembayaran sesuai sumber pendanaan (DAU, DAK).

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra BPKAD Tahun 2024-2026.

Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi yaitu :

- a. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas perencanaan anggaran, program, kegiatan dan pengelolaan APBD.
- b. Meningkatnya aspek transparansi, partisipasi, responsibilitas dan akuntabilitas pengelolaan belanja daerah.
- c. Meningkatnya jumlah dan jenis sumber-sumber pembiayaan alternatif yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Tabel 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Capaian Tahun 2022	Satuan	Target
						2025
1	TUJUAN Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Berkualitas	1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Perhitungan sesuai Permendagri 19 Tahun 2020	N/A	Indeks	65
		2. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Perhitungan sesuai ketentuan Kemenkeu RI No. 127/KM.6/2022	N/A	Indeks	60
2	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP sesuai dengan Pergub No. 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	59 (CC)	Poin	70 (B)
	SASARAN 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	1. Opini BPK atas LKPD	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur oleh BPK RI	WTP	OPINI	WTP

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator	Cara Perhitungan	Capaian Tahun 2022	Satuan	Target
						2025
		2. Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMD	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Temuan BPK}}{\text{Jumlah Temuan BPK}} \times 100\%$	N/A	Persentase	60
	SASARAN 2 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	1. Nilai SAKIP BPKAD Prov.Kaltim 2. Indeks Kepuasan atas pelayanan BPKAD	Hasil Evaluasi Inspektorat terhadap SAKIP sesuai dengan Pergub No. 26 Tahun 2022 Tentang Pedoman Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Hasil Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017	CC (59) 80,22	Poin Indeks	70 (B) 86

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah. Program Kerja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dalam hal ini BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/ Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Terbitnya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
- b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota**
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
- d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
- e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
- f. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

3.4 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Beserta Anggaran

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program BPKAD Prov.Kaltim Tahun 2025

Dokumen Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur merupakan penjabaran dari dokumen Renstra BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (RENJA) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi Kalimantan Timur. Rencana Kerja dan Pendanaan untuk kegiatan tahun 2025 merupakan implementasi dari Renstra Tahun 2024-2026

Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur yang akan dilaksanakan tertuang dalam Renja Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Program BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Lokasi	Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
				Target	Pagu	
5.02.5.02.5.02.02.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					Rp 7.013.094.015.150,00
5.02.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		86	Indeks	Rp 425.805.499.683,00
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		100	Persentase	
5.02.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp 2.096.510.020,00
5.02.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	2	Dokumen	Rp 883.556.259,00
5.02.001.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 159.296.091,00
5.02.001.1.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 68.390.000,00
5.02.001.1.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 160.706.611,00
5.02.001.1.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 73.250.000,00

		Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
5.02.001.1.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Timur	2	Laporan	Rp 466.049.290,00
5.02.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Timur	7	Laporan	Rp 285.261.769,00
5.02.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	Kalimantan Timur	100	%	Rp 384.396.969.251,00
5.02.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kalimantan Timur	124	Orang/Bulan	Rp 381.598.951.351,00
5.02.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kalimantan Timur	400	Dokumen	Rp 2.000.000.000,00
5.02.001.1.02.003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kalimantan Timur	400	Dokumen	Rp 307.947.900,00
5.02.001.1.02.004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp 99.780.000,00
5.02.001.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp 124.736.000,00
5.02.001.1.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kalimantan Timur	3	Dokumen	Rp 111.644.000,00
5.02.001.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kalimantan Timur	3	Laporan	Rp 91.536.000,00
5.02.001.1.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 62.374.000,00
5.02.001.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	Kalimantan Timur	100	%	Rp 307.901.969,00

5.02.001.1.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	307.901.969,00
5.02.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasn Dokumen Administarasi Kepegawaian	Kalimantan Timur	100	%	Rp	1.907.022.974,00
5.02.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kalimantan Timur	1	Paket	Rp	496.387.460,00
5.02.001.1.05.003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	124.751.014,00
5.02.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kalimantan Timur	140	Orang	Rp	1.027.666.000,00
5.02.001.1.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kalimantan Timur	140	Orang	Rp	258.218.500,00
5.02.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	100	%	Rp	10.869.330.325,00
5.02.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	215.510.045,00
5.02.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	4.434.680.518,00
5.02.001.1.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	1.942.972.198,00
5.02.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Paket	Rp	372.587.870,00
5.02.001.1.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kalimantan Timur	6	Laporan	Rp	450.764.644,00
5.02.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	1.093.985.050,00
5.02.001.1.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	2.358.830.000,00
5.02.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	2.118.712.427,00
5.02.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kalimantan Timur	1	Unit	Rp	1.097.960.700,00

5.02.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kalimantan Timur	20	Unit	Rp	1.020.751.727,00
5.02.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	8.959.343.852,00
5.02.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	92.165.544,00
5.02.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	5.025.904.000,00
5.02.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	134.594.308,00
5.02.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	3.706.680.000,00
5.02.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	100	%	Rp	15.149.708.865,00
5.02.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kalimantan Timur	6	Unit	Rp	166.338.900,00
5.02.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kalimantan Timur	25	Unit	Rp	1.351.769.573,00
5.02.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kalimantan Timur	12	Unit	Rp	831.284.976,00
5.02.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kalimantan Timur	5	Unit	Rp	12.800.315.416,00
5.02.002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu		100	%	Rp	6.577.888.888.086,00
5.02.002.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	9.761.361.119,00
5.02.002.1.01.001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kalimantan Timur	2	Dokumen		309.040.000,00

5.02.002.1.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kalimantan Timur	2	Dokumen	308.170.000,00
5.02.002.1.01.003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi	Kalimantan Timur	37	Dokumen	1.797.052.000,00
5.02.002.1.01.004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang Diverifikasi	Kalimantan Timur	37	Dokumen	1.451.530.000,00
5.02.002.1.01.005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kalimantan Timur	37	Dokumen	675.310.000,00
5.02.002.1.01.006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kalimantan Timur	37	Dokumen	642.100.000,00
5.02.002.1.01.007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kalimantan Timur	2	Dokumen	566.569.834,00
5.02.002.1.01.008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kalimantan Timur	2	Dokumen	220.130.000,00
5.02.002.1.01.009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kalimantan Timur	3	Dokumen	212.410.000,00
5.02.002.1.01.011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	3.513.529.916,00
5.02.002.1.01.013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur	74	Orang	65.520.000,00
5.02.002.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keselarasan Dokumen Rancangan Perda Dan Perkada	Kalimantan Timur	100	%	Rp 1.240.104.000,00
5.02.002.1.02.002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	20	Laporan	Rp 268.610.000,00

5.02.002.1.02.003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kalimantan Timur	20	Laporan	Rp	268.610.000,00
5.02.002.1.02.004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	10	Laporan	Rp	274.936.000,00
5.02.002.1.02.006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Kalimantan Timur	3	Laporan	Rp	427.948.000,00
5.02.002.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	5.798.372.908,00
5.02.002.1.03.001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	880.279.974,00
5.02.002.1.03.002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	38.400.000,00
5.02.002.1.03.003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kalimantan Timur	460	Dokumen	Rp	163.600.000,00
5.02.002.1.03.004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	48.180.000,00
5.02.002.1.03.005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kalimantan Timur	16	Dokumen	Rp	1.052.078.760,00
5.02.002.1.03.006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kalimantan Timur	2	Dokumen	Rp	686.259.360,00

5.02.002.1.03.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp	907.909.546,00
5.02.002.1.03.008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Kalimantan Timur	12	Dokumen	Rp	330.424.628,00
5.02.002.1.03.009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kalimantan Timur	12000	Dokumen	Rp	732.335.965,00
5.02.002.1.03.010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	507.978.276,00
5.02.002.1.03.011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	10	Orang	Rp	450.926.399,00
5.02.002.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	4.965.514.461,00
5.02.002.1.04.001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kalimantan Timur	4	Laporan	Rp	182.934.000,00
5.02.002.1.04.002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,	Kalimantan Timur	84	Dokumen	Rp	1.602.372.390,00

	Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				
5.02.002.1.04.003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kalimantan Timur	12	Laporan	Rp 112.512.000,00
5.02.002.1.04.004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD , BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD , BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kalimantan Timur	48	Laporan	Rp 182.972.000,00
5.02.002.1.04.005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Kalimantan Timur	106	Dokumen	Rp 689.505.520,00
5.02.002.1.04.006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kalimantan Timur	6	Dokumen	Rp 256.403.165,00
5.02.002.1.04.008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kalimantan Timur	576	Dokumen	Rp 224.556.000,00
5.02.002.1.04.009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 207.920.000,00
5.02.002.1.04.010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp 139.741.902,00
5.02.002.1.04.011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Kalimantan Timur	480	Orang	Rp 1.081.192.000,00
5.02.002.1.04.012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Kalimantan Timur	6	Lembaga	Rp 285.405.484,00

5.02.002.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	90	%	Rp	6.555.570.060.000,00
5.02.002.1.05.002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Kalimantan Timur	2	Laporan	Rp	139.850.000,00
5.02.002.1.05.008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kalimantan Timur	10	Laporan	Rp	2.053.930.210.000,00
5.02.002.1.05.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kalimantan Timur	21	Laporan	Rp	100.000.000.000,00
5.02.002.1.05.010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Kalimantan Timur	16	Laporan	Rp	4.401.500.000.000,00
5.02.002.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	100	%	Rp	553.475.598,00
5.02.002.1.06.002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kalimantan Timur	3	Dokumen	Rp	553.475.598,00
5.02.003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Keseluruhan Target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)		60	%	Rp	9.399.627.381,00
5.02.003.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	Kalimantan Timur	100	%	Rp	9.399.627.381,00
5.02.003.1.01.001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	962.810.179,00
5.02.003.1.01.002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	152.955.000,00
5.02.003.1.01.003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	166.340.000,00
5.02.003.1.01.004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Dokumen	Rp	167.490.660,00
5.02.003.1.01.005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	634.841.248,00
5.02.003.1.01.006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	415.850.888,00

5.02.003.1.01.007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	2	Laporan	Rp	2.392.885.640,00
5.02.003.1.01.008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	3	Laporan	Rp	861.629.220,00
5.02.003.1.01.009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	124.764.000,00
5.02.003.1.01.010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	20	Dokumen	Rp	2.546.123.546,00
5.02.003.1.01.011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kalimantan Timur	8	Laporan	Rp	499.007.000,00
5.02.003.1.01.012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kalimantan Timur	1	Laporan	Rp	279.740.000,00
5.02.003.1.01.013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kalimantan Timur	50	Orang	Rp	195.190.000,00

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2025 sebagaimana pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPKAD Prov. Kaltim Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelomp ok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah						7.013.094.015.150,00						7.100.936.28 9.000,00		
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.013.094.015.150,00							7.100.936.28 9.000,00	
	5	02				KEUANGAN						7.013.094.015.150,00							7.100.936.28 9.000,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan	86 Indeks			86 Indeks	425.805.499.683,00						86 Indeks	84.068.352.3 04,00	
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti		100%			100%	100 %									
	5	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%			100%	2.096.510.020,00			-	-	-	100%	1.826.815.00 0,00	

	5	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	883.556.259,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	629.937.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA- SKPD) dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	159.296.091,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	188.981.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	68.390.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	80.991.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	160.706.611,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	197.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	73.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	98.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			2 Laporan	466.049.290,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	314.968.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			7 Laporan	285.261.040,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	7 Laporan	314.968.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100%			100%	384.396.969.251,00			-	-	-	100%	37.889.760.304,00	
	5	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan			124 Orang/ Bulan	381.598.951.351,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	124 Orang/ Bulan	34.724.379.304,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen			400 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400 Dokumen	2.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen			400 Dokumen	307.947.900,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	400 Dokumen	503.949.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			12 Dokumen	99.780.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	107.989.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	124.736.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	134.986.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			3 Dokumen	111.644.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	251.974.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			3 Laporan	91.536.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	98.990.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	62.374.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	67.493.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100%			-	307.901.969,00			-	-	-	100%	899.910.000,00	
	5	02	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PERANGKAT DAERAH (PD)														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			12 Laporan	307.901.969,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	899.910.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasn Dokumen Administarasi Kepegawaian	100%			100%	1.907.022.974,00			-	-	-	100 %	1.889.811.000,00	
	5	02	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	496.387.460,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Paket	269.973.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen			12 Dokumen	124.751.014,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	134.986.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang			140 Orang	1.027.666.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	140 Orang	1.214.879.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang			140 Orang	258.218.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	140 Orang	269.973.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100%			100%	10.869.330.325,00			-	-	-	100 %	10.753.928.000,00	
	5	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	215.510.045,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	224.977.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	4.434.680.518,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	2.699.731.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	1.942.972.198,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	2.699.731.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket				12 Paket	372.587.870,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Paket	449.955.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan				6 Laporan	450.764.644,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Laporan	629.937.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan				12 Laporan	1.093.985.050,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	1.799.821.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada PERANGKAT DAERAH (PD)															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen				12 Dokumen	2.358.830.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	2.249.776.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				100%	2.118.712.427,00			-	-	-	100%	2.339.766.000,00	
	5	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															

							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	1.097.960.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Unit	1.439.856.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			20 Unit	1.020.751.727,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Unit	899.910.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100%	8.959.343.852,00			-	-	-	100%	12.539.946.000,00	
	5	02	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	92.165.544,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	89.991.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	5.025.904.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	5.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	134.594.308,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	449.955.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	3.706.680.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	7.000.000.00 0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100%			100%	15.149.708.865,00			-	-	-	100%	15.928.416.0 00,00	
	5	02	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit			6 Unit	166.338.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Unit	179.982.000, 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit			25 Unit	1.351.769.573,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	25 Unit	1.349.865.00 0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			12 Unit	831.284.976,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Unit	899.910.000, 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			5 Unit	12.800.315.416,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	5 Unit	13.498.659.0 00,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

												Semua Kel/Desa								
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu	100%			100%	6.577.888.888.086,00						100%	22.362.778.0 00,00	
	5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100%			100%	9.761.361.119,00			-	-	-	100%	7.685.231.00 0,00	
	5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	309.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	179.982.000, 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen			2 Dokumen	308.170.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	224.977.000, 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD														
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen			37 Dokumen	1.797.052.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	37 Dokumen	1.214.879.00 0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD														

							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen			37 Dokumen	1.451.530.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	37 Dokumen	899.910.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD														
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen			37 Dokumen	675.310.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	37 Dokumen	143.985.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD														
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen			37 Dokumen	642.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	37 Dokumen	143.985.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen			2 Dokumen	566.569.834,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	296.970.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen			2 Dokumen	220.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	197.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen			3 Dokumen	212.410.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	242.975.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

							Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan			20 Laporan	268.610.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Laporan	269.973.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan			10 Laporan	274.936.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Laporan	359.964.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan			3 Laporan	427.948.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	179.982.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100%			100%	5.798.372.908,00			-	-	-	100%	6.074.409.000,00	
	5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen			12 Dokumen	880.279.974,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	287.971.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

											Semua Kel/Desa								
	5	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya													
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan			1 Laporan	38.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	71.992.000,0 0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD													
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen			460 Dokumen	163.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	460 Dokumen	89.991.000,0 0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah													
						Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	48.180.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	89.991.000,0 0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen			16 Dokumen	1.052.078.760,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	16 Dokumen	1.529.848.00 0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank													

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen			2 Dokumen	686.259.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Dokumen	584.941.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan			12 Laporan	907.909.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	1.124.888.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen			12 Dokumen	330.424.628,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Dokumen	314.986.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12000 Dokumen			12000 Dokumen	732.335.965,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12000 Dokumen	584.941.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen			1 Dokumen	507.978.276,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	719.928.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	450.926.399,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	10 Orang	674.932.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%			100%	4.965.514.461,00			-	-	-	100%	5.894.409.000,00	
	5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan			4 Laporan	182.934.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	4 Laporan	197.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban														
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen			84 Dokumen	1.602.372.390,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	84 Dokumen	1.799.821.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan			12 Laporan	112.512.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	12 Laporan	125.987.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan			48 Laporan	182.972.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	48 Laporan	197.980.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi														

							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen			106 Dokumen	689.505.520,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	106 Dokumen	899.910.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen			6 Dokumen	256.403.165,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Dokumen	359.964.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen			576 Dokumen	224.556.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	576 Dokumen	242.975.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	207.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	224.977.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	139.741.902,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	179.982.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

													Semua Kel/Desa							
	5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang			480 Orang	1.081.192.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	480 Orang	1.169.883.00 0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi														
							Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga			6 Lembaga	285.405.484,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	6 Lembaga	494.950.000, 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%			90%	6.555.570.060.000,00			-	-	-	90%	6.983.621.05 1.696,00	
	5	02	02	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan			2 Laporan	139.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	188.981.000, 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														

							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan			10 Laporan	2.053.930.210.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER - DBH SUMBER DAYA ALAM (SDA) MINERBA - ROYALTY	-	-	-	10 Laporan	2.145.558.720.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan			21 Laporan	100.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yg dipisah, lain PAD yg Sah, pendapatan transfer, DAU, IUPK, SILPA	-	-	-	21 Laporan	708.633.536.696	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi														
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan			16 Laporan	4.401.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER - DBH SUMBER DAYA ALAM (SDA) MINERBA - ROYALTY	-	-	-	16 Laporan	4.129.239.814.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100%			100%	553.475.598,00			-	-	-	100%	1.439.856.000,00	
	5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														

							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	553.475.598,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Dokumen	1.439.856.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Keseluruhan Target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)	60%			60%	9.399.627.381,00						47%	10.663.935.000,00	
	5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	47 %			100%	9.399.627.381,00			-	-	-	100%	10.663.935.000,00	
	5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga														
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	962.810.179,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	764.924.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	152.955.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	134.986.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	166.340.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	179.982.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														

							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	167.490.660,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Dokumen	629.937.000, 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	634.841.248,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	719.928.000, 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	415.850.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	449.955.000, 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan			2 Laporan	2.392.885.640,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	2 Laporan	2.699.731.00 0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan			3 Laporan	861.629.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	3 Laporan	899.910.000, 00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														

							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan			1 Laporan	124.764.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	134.986.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen			20 Dokumen	2.546.123.546,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	20 Dokumen	2.699.731.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan			8 Laporan	499.007.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	8 Laporan	539.946.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan			1 Laporan	279.740.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	1 Laporan	179.982.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang			50 Orang	195.190.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	50 Orang	629.937.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	J U M L A H											7.013.094.015.150,00							7.100.936.289.000,00	

Keterangan :

Selaku SKPD dan SKPKD berjumlah	Rp. 7.013.094.015.150,-
Pembiayaan	<u>Rp. 900.000.000.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 7.913.094.015.150,-

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, disusun berdasarkan Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, selain itu Renja Perangkat Daerah (PD) BPKAD Provinsi Kalimantan Timur juga merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang mempunyai fungsi untuk menentukan arah dan rencana serta memperhatikan sumber daya yang ada dengan harapan dapat menjadi acuan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Renja BPKAD Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu sarana tata kelola organisasi yang dapat dipergunakan untuk :

- a. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- b. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- c. Merencanakan program/ kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- d. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- e. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

5.2 Rencana tindak lanjut

Dengan tersusunnya Renja BPKAD Provinsi Kaltim ini, maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
- b. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar PD sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan aset daerah;

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BPKAD Provinsi Kaltim yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.